

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI
MENURUT PASAL 30 AYAT 2 DAN 3 PERATURAN DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN
KETERTIBAN UMUM
Studi Terhadap Pedagang Kaki Lima di Pasar Tugu**



Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

MUTIA SARI

NPM : 1621030055

Program studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI
MENURUT PASAL 30 AYAT 2 DAN 3 PERATURAN DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN
KETERTIBAN UMUM
Studi Terhadap Pedagang Kaki Lima di Pasar Tugu**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

**MUTIA SARI
NPM : 1621030055**

Program studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.S.I.

Pembimbing II : Eti Karini, S.H., M.Hum.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

ABSTRAK

Islam sangat menjunjung tinggi bermuamalah, salah satunya yaitu dengan cara jual beli. Kegiatan jual beli yang berada di wilayah pasar tugu begitu banyak sekali, dari mulai makanan, minuman, pakaian, ikan, dan lain sebagainya. Sebagian orang yang melakukan kegiatan jual beli pada tempat-tempat seperti, di badan jalan, trotoar halte, halaman serta tempat parkir toko dan atau rumah toko, atau bisa di sebut dengan PKL. Hal ini menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan oleh Perda kota Bandar Lampung, yang pada akhirnya menyebabkan kemacetan dan keresahan masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana pelaksanaan jual beli yang dilakukan PKL di pasar tugu berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat 2 dan 3 Perda No.1 th 2018 dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh PKL di pasar tugu menurut ketentuan pasal 30 ayat 2 dan 3 Perda No.1 th 2018? Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan jual beli yg dilakukan PKL di wilayah pasar tugu berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat 2 dan 3 Perda No.1 th 2018 dan tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh PKL di pasar tugu menurut ketentuan pasal 30 ayat 2 dan 3 Perda No.1 th 2018. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Data dan sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Menggunakan Sampel *Purposive Sampling*, Sampel dalam penelitian ini berjumlah 20 orang. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam pengolahan data menggunakan teknik editing dan sistematisasi. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan peraturan yang berlaku di Kota Bandar Lampung, kegiatan PKL di kawasan yang dilarang dalam Pasal 30 Perda No. 1 Tahun 2018 tidak diperbolehkan jika tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Hal ini mengganggu dan mengambil hak pejalan kaki, mengakibatkan kemacetan yang panjang, mengganggu lalu lintas dan merusak keindahan kota. Larangan tersebut merupakan sebuah kebijakan Pemerintah Daerah yang tidak lain dibuat untuk kemaslahatan umum bagi masyarakat. Dalam segi pelaksanaannya masih kalah dengan hukum adat atau hukum kebiasaan. Ditinjau dari Hukum Islam dasar akad jual beli tersebut sah karena telah memenuhi syarat dan rukunnya. Jual beli sangat dianjurkan, namun bila ada ketetapan larangan sesuai dengan QS. An-Nisa (4):59 yang dimana kita harus taat kepada Allah dan ulil amri di antara kalian hal ini mencerminkan bahwa kita harus taat pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Jika kegiatan ini tetap berjalan akan membawa mudarat bagi orang banyak. Karena merampas hak pejalan kaki, hak orang berkendara, hak lahan parkir pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Islam mengajarkan untuk mencari harta dengan cara yang halal, bukan dengan cara mengambil hak orang lain. Tata cara mengelola harta pun sudah tertuang didalam fiqh muamalah. Oleh karena itu, jika ingin selamat dunia dan akhirat, kita harus memakai etika di dalam keseluruhan aktivitas bisnis kita.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: JL. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: 703289

PERSETUJUAN

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Menurut Pasal 30 Ayat 2 Dan 3 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum (Studi Terhadap Pedagang Kaki Lima di Pasar Tugu)
Nama : Mutia Sari
NPM : 1621030055
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.S.I.
NIP. 197304142000032002

Eti Karini, S.H., M.Hum.
NIP. 197308162003122003

Ketua Jurusan Muamalah,

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Menurut Pasal 30 Ayat 2 Dan 3 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum (Studi Terhadap Pedagang Kaki Lima di Pasar Tugu)"**. Disusun oleh, **Mutia Sari**, NPM: 1621030055, program studi **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 10 Februari 2020**.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : **Agustina Nurhyati, S.Ag. M.H.** (.....)

Sekretaris : **Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag.** (.....)

Penguji Utama : **Khoiruddin, M.S.I.** (.....)

Penguji Pendamping I : **Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.** (.....)

Penguji Pendamping II : **Eti Karini, S.H., M.Hum** (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil
amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang
sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu)
dan lebih baik akibatnya."

(QS. An-nisa [4]:59)



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan bahagia, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta Mat Zen dan Ibundaku tersayang Mahiyah yang telah melindungi, mengasuh, menyayangi dan mendidik, menjaga ku sejak dalam kandungan hingga dewasa kini, serta senantiasa mendo'akan dan sangat mengharapkan keberhasilanku. Berkat do'a restu keduanyalah sehingga dapat menyelesaikan kuliah ini. Terimakasih atas setiap tetes keringat yang di korbakan untukku, setiap do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, selalu memberiku semangat dan motivasi. Semoga semua ini merupakan salah satu hadiah terindah untuk kedua orang tua.
2. Kakakku Maulana Yusuf dan Kedua adikku M.Agung dan Ajizah yang telah banyak membantu baik dari segi materil maupun moril serta motivasi sehingga penulis dapat meraih keberhasilan dan tercapai cita-cita. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Mutia Sari, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 23 Mei 1998, anak ke tiga dari pasangan Mat Zen dan Mahiyah. Pendidikan dimulai dari TK Dwi Tunggal Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2004, SD Negeri 6 Penengahan Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2010, SMP Negeri 8 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2013, SMK Negeri 1 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2016, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 1439 H / 2016 M.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat dan kelancaran, engkaulah faktor utama dalam keberhasilan penulisan skripsi ini. Selanjutnya shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang merupakan uswatun hasanah atau suri tauladan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini.

Terselesaikannya skripsi ini yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksana Jual Beli Menurut Pasal 30 Ayat 2 Dan 3 Perda Kota Bandar Lampung No. 1 Th 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum (Study Terhadap Pkl Di Pasar Tugu)"**. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M. Ag, selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini;
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syariah;

3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Juhrotul Khulwah, M.SI. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan, serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M. Si yang selalu memberikan motivasi semangat, dukungan dan senantiasa membimbing penulis.
5. Ibu Eti Karini, S.H., M.Hum. yang dengan sabar membimbing penulis untuk penyelesaian skripsi.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung;
7. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
8. Para Responden yang telah mengizinkan penulis untuk penelitian. Terimakasih atas waktu dan bantuannya;
9. Bapak Adiyansyah, S.E.,M.H selaku Kepala Dinas Perdagangan, yang telah memberikan informasi terkait pasar tugu.
10. Bapak Farid Junuza, selaku Kepala Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, yang telah memberikan informasi terkait pasar tugu.
11. Tim KRS ku Alfiyyah, Resti dan Riska, teman seperjuangan untuk menghabiskan mata kuliah dengan nilai yang baik.
12. Sahabat-sahabat tersayang Reni, Tia, Siska, Ngimbar, Elma, Hesty, Ayu, Evi, Eva, Welly, yang telah menemani penulis dalam suka dan duka mengarungi

dinamika kehidupan kampus. Terimakasih atas segala warna yang telah kalian berikan.

13. Teman-teman seperjuangan Muamalah F dan seluruh teman angkatan 2016. Terimakasih atas pertemanan yang penuh kehangatan.
14. Saudara-saudara KKN Kertosari ku yang tidak bisa kusebut satu persatu terimakasih atas semangat dan motivasi yang kalian berikan.
15. Almamater tercinta Semoga amal baik kalian mendapat balasan dari Allah SWT.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang akan membangun penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 20 Nov 2019

Mutia Sari

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	6
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	6
G. Signifikasi Penelitian	7
H. Metode Penelitian	7
 BAB II KAJIAN TEORI	
A. Jual Beli dalam Islam	14
1. Pengertian Jual Beli	14
2. Dasar Hukum Jual Beli	17
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	21
4. Macam-macam Jual Beli	32
B. Etika Bisnis dalam Islam	42
1. Pengertian Etika Bisnis.....	42
2. Etika Bisnis Menurut Al-Qur'an dan Hadist	44
3. Konsep Etika Bisnis Islam	50
4. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum	51
C. Pengertian PKL yang Melakukan Jual Beli	66
1. Pengertian PKL.....	66
2. Ciri-ciri PKL.....	68
3. Dasar Hukum PKL.....	71
D. Tinjauan Pustaka.....	72
 BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum PKL di Pasar Tugu	76
1. Sejarah Pasar Tugu	76

2. Struktur Organisasi UPT Pasar Tugu Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung	77
3. Sejarah PKL	79
B. Lapak PKL	82
C. Praktik Jual Beli Pedagang Kaki Lima	83
1. Praktik Jual Beli Pedagang Kaki Lima di Pasar Tugu.....	83
2. Faktor terjadinya Jual Beli Pedagang Kaki Lima di Pasar Tugu.....	85
D. Pemahaman Pembeli Atas Adanya Perda	87
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Pelaksanaan jual beli yang dilakukan PKL di pasar tugu berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat 2 dan 3 Perda No.1 th 2018.....	88
B. Tinjauan hukum Islam terhadap Pelaksanaan jual beli yang dilakukan PKL di pasar tugu berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat 2 dan 3 Perda No.1 th 2018.....	90
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	93
B. Rekomendasi	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN	
Lampiran 1 : Data Pasar Tradisional Kota Bandar Lampung Tahun 2019 Data Los Amparan	
Lampiran 2 : Data Pasar Tradisional Kota Bandar Lampung Tahun 2019 Data PKL	
Lampiran 3 : Data Hasil Wawancara	
Lampiran 4 : Permohonan Izin Riset	
Lampiran 5 : Dokumen dan Foto Pelaksanaan Tindakan	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Bagan Struktur Organisasi Upt Pasar Tugu Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.....	78
2. Papan Data Unit Pasar Tugu.....	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dalam judul skripsi maka akan diuraikan secara singkat kata kunci yang terdapat di dalam judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual beli Menurut Pasal 30 Ayat 2 Dan 3 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum (Studi Terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Tugu)". Adapun istilah-istilah tersebut :

1. Tinjauan

Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹ Tinjauan yang dimaksud adalah ditinjau dari pandangan Hukum Islam.

2. Hukum Islam

Hukum Islam menurut ahli ushul fiqh yaitu firman Allah yang di tunjukkan kepada orang mukhalaf yaitu orang-orang yang sudah cakap bertanggung jawab hukum, berupa perintah, larangan, atau kewenangan memilih yang bersangkutan dengan perbuatan.²

3. Pelaksana

Pelaksana adalah Orang yang mengerjakan atau melaksanakan.³

¹Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 1470.

²Amir Syarifudin, *Usul Fiqih*, Jilid 1, Cet.1, (Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, 1997), h.5

³Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia ..., h. 774.

4. Jual beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang lain dengan cara tertentu.⁴

5. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang di buat oleh kepala daerah provinsi maupun kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.⁵

Kesimpulan, Meninjau dalam Hukum Islam pelaksanaan pelaksanaan jual beli yang melanggar Peraturan Daerah yang telah di tetapkan terhadap Pedagang Kaki Lima(PKL) yang berada di pasar Tugu.

B. Alasan Memilih Judul

Beberapa alasan yang mendasari penelitian sehingga terdorong untuk membahas dan meneliti ini dalam bentuk skripsi sebagai berikut.

1. Alasan Objektif

PKL yang berada di wilayah pasar tugu sangat menjamur, sebenarnya hal ini sudah diatur dalam Perda Kota Bandar lampung No. 1 tahun 2018, namun pada praktiknya hal ini tidak sesuai dengan peraturan Perda. Atas larangan tempat-tempat untuk berjualan sedangkan dalam Islam sangat menganjurkan berjualan, Hal ini yang menggugah peneliti untuk meninjau praktik jual beli di wilayah pasar

⁴Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap) (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h.278.

⁵Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta:Kanisius, 2007), h.202.

tugu dalam hukum Islam terhadap peraturan larangan PKL berjualan di wilayah yang telah di tentukan.

2. Alasan Subjektif

Penelitian ini merupakan permasalahan yang berkaitan dalam bidang Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk masyarakat muamalah yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup adalah jual beli. Tindakan tersebut adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang lain dengan cara tertentu.⁶

Bentuk perikatan jual beli merupakan sarana tolong-menolong antara sesama manusia, dan memiliki landasan yang kuat dalam syariat Islam. Transaksi jual beli merupakan aktivitas yang dibolehkan dalam Islam baik disebutkan dalam Al-Qur'an, Al-Hadist, maupun Ijma Ulama. Adapun dasar hukum jual beli yaitu sebagaimana firman Allah SWT dalam (QS. Al-Baqarah ayat (2):275).

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."⁷

Jual beli bisa diklasifikasikan menjadi jual beli yang benar (sahih), jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya (bathil) dan jual beli yang rusak (fasid). Secara umum, jual beli sahih dimaknai dengan jual beli yang

⁶Sulaiman Rasjid, FiqhIslam (Hukum Fiqh Lengkap), h. 278.

⁷Departemen Negara RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Jakarta: Lautan Lestari, 2007), h.69.

telah memenuhi syarat dan rukun akad. Adapun jual beli yang tidak benar (gayru sahih) adalah yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.⁸

Kegiatan Muamalah dengan cara jual-beli ini dapat kita temui banyak sekali di wilayah Pasar. Yang dimana Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa.⁹ Salah satu pasar di wilayah Bandar Lampung yakni Pasar Tugu yang berada di jalan Hayam Wuruk No. 68 TJ. Agung Raya, Kedamaian, kota Bandar Lampung, disanalah banyak terdapat proses jual beli, berbagai macam produk dari mulai sayuran, buah-buahan, ikan, pakaian, aksesoris, hingga jajanan dan makanan siap saji.

Namun yang terjadi di pasar Tugu Bandar Lampung para Pedagang menjajakan barangnya di berbagai tempat ada yang mempunyai toko atau lapak milik sendiri, ada pula yang menyewa toko, menyewa lataran toko, bahkan hingga menggunakan tempat-tempat kepentingan umum, seperti halaman toko, tempat parkir toko, badan jalan/trotoar.

Beberapa pedagang yang menggunakan kepentingan umum dapat di katakan Pedagang Kaki lima sering di sebut dengan PKL. Sebenarnya Pemerintah sudah menempatkan tempat-tempat untuk para PKL berdagang atau menjajakan barang-barangnya, namun tidak terealisasi dengan baik, Bahkan di dalam Perda Kota Bandar Lampung No.1 tahun 2018 melarang membeli barang dagangan PKL yang berjualan pada tempat-tempat yang di sebutkan diatas. Namun hal ini tidak terealisasi juga, hal ini terjadi karena

⁸Rahmat syafei, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.91-92.

⁹ <http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-pasar-dan-jenis-jenis-pasar.html>. diakses pada Tanggal 15 Februari 2018.

banyak kemungkinan, seperti si Pembeli yang tidak mengetahui perihal larangan membeli barang PKL, atau karna Pembeli malas untuk berjalan kedalam pasar, hingga ia tidak harus berjalan jauh dari parkirannya, atau bahkan masyarakat sudah mengetahui akan hal larangan membeli barang PKL namun ia tetap melakukannya.

Dalam pandangan Islam tertera bahwasannya kita harus mentaati aturan yang telah di buat sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."¹⁰

Dalam hal ini peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksana Jual beli Menurut Pasal 30 Ayat
2 Dan 3 Perda Kota Bandar Lampung No. 1 Th 2018 Tentang Ketentraman
Masyarakat Dan Ketertiban Umum (Studi Terhadap Pkl Di Pasar Tugu)”

¹⁰Departemen Negara RI, Al-Qur'an dan, h. 36.

D. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian dalam skripsi ini adalah terletak pada praktik jual-beli yang di lakukan PKL di tempat-tempat yang dilarang Perda No. 1 Th 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum yang di tinjau secara hukum Islam, di Pasar Tugu jalan Hayam Wuruk No. 68 TJ. Agung Raya, Kedamaian, kota Bandar Lampung,

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli yang dilakukan PKL di pasar tugu berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat 2 dan 3 Perda No.1 th 2018?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Pelaksanaan jual beli yang di lakukan PKL di pasar tugu berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat 2 dan 3 Perda No.1 th 2018?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli yang dilakukan PKL di wilayah pasar tugu berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat 2 dan 3 Perda No.1 th 2018.
 - b. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan jual beli yang di lakukan oleh PKL di pasar tugu menurut ketentuan pasal 30 ayat 2 dan 3 Perda No.1 th 2018.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara Teoritis berguna sebagai penambahan wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi

penulis berikutnya, dan dapat diberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya dalam praktik membeli barang PKL, dan PKL yang telah melakukan tindakan jual beli di wilayah yang di larang didalam Perda Bandar Lampung dan mengetahui bagaimana menurut hukum Islam.

- b. Secara Praktis Penelitian ini dimaksud sebagai suatu syarat tugas guna memperoleh S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Signifikasi Penelitian

1. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan alternative informasi, bahan referensi, serta memberikan pemahaman terkait jual beli PKL yang berada di wilayah pasar tugu, baik larangan menjual di wilayah PKL bahkan pembeli yang membeli barang jualan PKL. Selain itu juga diharapkan menjadi stimulasi bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan penelitian ini merupakan metode kualitatif. Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna

lebih ditonjolkan dalam penelitian. Penggunaan metode tersebut akan di sebarakan sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau responden.¹¹ yang di lakukan PKL di wilayah Pasar Tugu dan didukung oleh penelitian Pustaka (*Library Research*) dimana peneliti langsung melakukan penelitian ke lapangan dan juga buku-buku untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi langsung subjek yang bersangkutan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis secara bertahap dan berlapis dengan kualitatif, bersifat deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menyelidiki keadaan atau hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya di paparkan dalam bentuk laporan penelitian. Mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi.

2. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan

¹¹Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung; Pusat penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 9.

yang sebenarnya, yang di peroleh langsung dari responden atau objek yang di teliti dan diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan jual beli yang dilakukan PKL di wilayah Pasar Tugu Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung.

b. Data Skunder

Data skunder adalah data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data. Data skunder diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian, akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan di kaji.¹² sumber data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger agenda dan sebagainya.¹³ Metode ini

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2008), h. 137.

¹³Suharsimi Arikunto, *Proseduur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian PKL yang berada di wilayah yang di larang oleh PERDA.

b. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.¹⁴ Observasi yang dilakukan dengan mengamati praktik yang dilakukan oleh para PKL di pasar Tugu Bandar Lampung dalam menegakkan Perda No 1 tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

c. Wawancara

Wawancara adalah Penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau pertanyaan secara langsung untuk mengetahui konsep-konsep yang berkaitan dengan penetapan harga yang tengah terjadi dalam masyarakat. Hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur, yaitu wawancara dengan memberikan pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya.¹⁵

¹⁴*Ibid.* h. 227.

¹⁵*Ibid.* h. 137.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa populasi merupakan keseluruhan dari subyek penelitian.¹⁶ Populasi terdiri dari Pedagang, Pembeli, Dinas Pasar dan Dinas Perdagangan. Populasi Berjumlah 200 orang, yang terdiri dari penjual, pembeli, dinas pasar dan dinas perdagangan.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar maka, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya di karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang di ambil dari populasi. Sampel yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu menggunakan *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan menentukan sendiri sampel yang di ambil karena pertimbangan tertentu.¹⁷

Dalam pengambilan sampel peneliti berpedoman pada Suharsimi Arikunto yang menyatakan bahwa apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika subyeknya besar (lebih dari 100 orang) dapat menggunakan sampel. Menurut

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2006). H.108.

¹⁷ *Ibid.* h.81.

sampel diambil dari 10 %-15% hingga 20%-25% atau bahkan boleh lebih dari 25% dari jumlah populasi yang ada.¹⁸

Berdasarkan populasi diatas terdiri 200 orang maka tata cara pengambilan sampel diatas, sampel yang diambil adalah 10% X 200= 20 orang, jadi sampel dari penelitian ini berjumlah 20 orang yang terdiri dari Penjual, Pembeli, Dinas Pasar dan Dinas Perdagangan yang berada diwilayah Pasar Tugu Bandar Lampung. Sebagai perwakilan subjek penelitian dengan menggunakan *Purposive Sampling*. Dengan perincian, 8 orang pedagang, 9 orang pembeli, 2 orang Dinas Pasar, dan 1 orang Dinas Perdagangan.

5. Metode Pengolahan Data

Dalam metode pengolahan data ini, penulis menggunakan beberapa cara diantaranya:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang diperoleh. Tahapan editing yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini, yakni menyajikan hasil wawancara dan dokumentasi yang disajikan dengan menggunakan kalimat yang baku dan mudah dimengerti. Peneliti akan melakukan proses Editing terhadap hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu*, h.112.

b. Sistematika Data (*Systematizing*)

Systematizing data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

c. Analisa Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan kualitatif melalui cara berfikir Deduktif. Metode deduktif yaitu mempelajari suatu gejala umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berfikir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.¹⁹

Metode ini diawali dari pembentukan teori, hipotesis, definisi operasional, instrumental dan operasionalisasi. Dengan kata lain, untuk memahami suatu gejala terlebih dahulu harus memiliki konsep dan teori tentang gejala tersebut dan selanjutnya dilakukan penelitian di lapangan. Dengan demikian konteks pendekatan deduktif tersebut, konsep dan teori merupakan kata kunci untuk memahami suatu gejala.

¹⁹ *Ibid*.h.137.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual beli dalam Islam

1. Pengertian Jual beli

Kata jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli". Kata "jual" dan "beli" mempunyai arti yang berbeda. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan penjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.

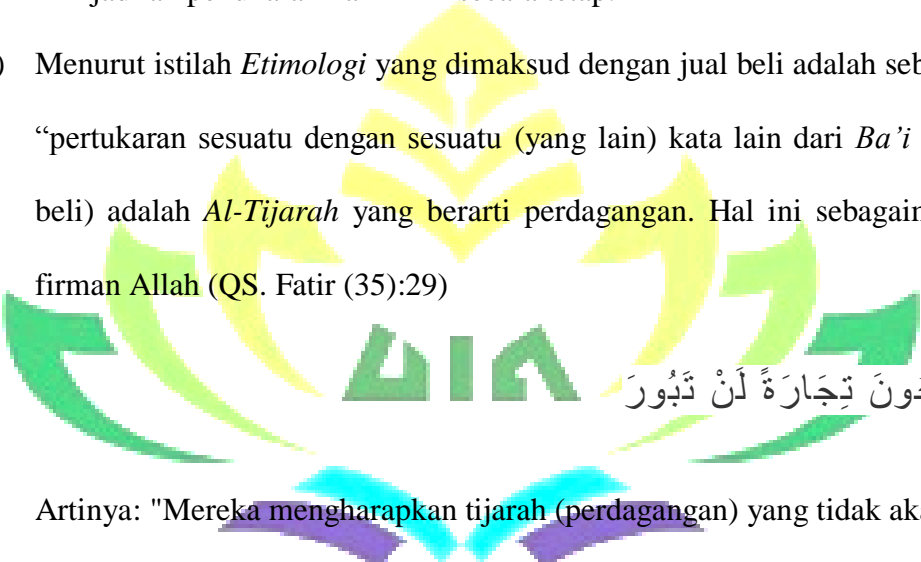
Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak yang lainnya membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.²⁰

Jual beli (buyu', jamak dari bai') atau perdagangan atau perniagaan atau *trading*²¹ Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *Al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*.

- 1) Menurut istilah *Terminologi* yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut.
 - a) Perukaran antara barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari yang satu pada yang lain atas dasar saling merelakan.

²⁰Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), h. 139-140.

²¹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Cet.4, (Jakarta: Rajawali, 2013), h. 76.

- b) Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan Syara.
 - c) Saling tukar harta, saling menerima, dapat di kelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan Syara.
 - d) Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang di bolehkan.
 - e) Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.²²
- 2) Menurut istilah *Etimologi* yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai “pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) kata lain dari *Ba’i* (jual beli) adalah *Al-Tijarah* yang berarti perdagangan. Hal ini sebagaimana firman Allah (QS. Fatir (35):29)
- 
يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ
- Artinya: "Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi"²³
- 3) Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.
- a) Jual beli yang bersifat umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 10, (Jakarta: Rajawali, 2016), h.67.

²³ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 4, (Permatanet Publishing, 2016), h. 103.

- b) Jual beli yang bersifat khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bedanya dapat di realisir dan ada seketika (tidak di tangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah di ketahui sifat-sifatnya atau sudah di ketahui terlebih dahulu.²⁴

Kesimpulan dari definisi diatas jual beli dapat terjadi dengan cara Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela. Harta adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Dalam istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta disini sama pengertiannya dengan objek hukum, yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subjek hukum. Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional).

Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut di pertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan disini milik/harta tersebut dipertukarkan dengan alat

²⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 67.

pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya. Misalnya, uang rupiah dan mata uang lainnya.²⁵

2. Dasar Hukum Jual beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw.²⁶ Jual beli dengan sistem jual beli merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan pada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-quran, hadis ataupun ijma ulama. Diantara dalil yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah firman Allah: QS. An-nisa (4) 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁷

Dalam surat Al-Baqarah (2) 275, Allah swt. Berfirman :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ

²⁵Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi*, h. 139-140.

²⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 113.

²⁷Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Lautan Lestari, 2007),

مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”²⁸

Dalam ayat ini Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli mendapat pengakuan dan legalitas dari syariah, dan sah untuk di operasionalkan dalam praktik pembiayaan bank syariah karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi.²⁹

Dasar hukum jual beli dalam sunah Rasulullah saw. Diantaranya adalah hadis dari Rifa’ah ibn Rafi’ bahwa : "Dari Rifa’ah bin Rafi’ radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallamditanya:”Apakah pekerjaan yang paling baik/afdhol?”³⁰ Beliau menjawab:”Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur. (Hadits riwayat al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim rahimahumallah)."

²⁸Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Lautan Lestari, 2007), h. 36.

²⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Cet. 2, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 91-92.

³⁰Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, h. 113.

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat itu lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu harta yang dusta.³¹

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah.³² Dalam hadist disebut riwayat dari Abu Said al Khudri bahwa Rasulullah bersabda “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”. (HR.Al-Baihaqi dan Ibnu Majah). Sabda yang lain “ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli tidak secara tunai, *muqaradhadh* (*mudharabah*) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk di jual”. (HR.Ibn Majah).

Hadist diatas memberikan persyaratan bahwa akad jual beli jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli, seperti penentuan harga jual, margin yang diinginkan, mekanisme pembayaran, dan lainnya, harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan bank, tidak bisa di tentukan secara sepihak.³³ Dalam riwayat At-Tirmidzi rasulullah bersabda:

³¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. 3 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 103.

³²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 114.

³³Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik*, h. 91-92.

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ, وَالصِّدِّيقِينَ, وَالشُّهَدَاءِ

“Pedagang yang dapat dipercaya dan jujur akan bersama-sama dengan para nabi, shiddiqin, syuhada.” (HR. At Tirmidzi).”

Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny di surga) dengan para nabi, para siddiqin, dan para syuhada.³⁴

Adapun dalil ijma’, sepakat tentang halalnya jual beli dan haramnya riba, berdasarkan ayat dan hadist diatas.³⁵ Ulama sepakat memperbolehkan jual beli dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³⁶ Para ulama telah bersepakat mengenai kehalalan jual beli, dan sangat dianjurkan hal ini merupakan salah satu sunnah Rasulullah.³⁷ Para ulama fiqih telah sepakat bahwa jual beli itu boleh-boleh saja dilakukan, dengan syarat telah memenuhi rukun dan syarat yang jual beli. Pada dasarnya semua bentuk muamalah dapat dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.³⁸ Kebutuhan manusia dengan adanya transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan di syari’at. Oleh karena itu praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak masa rasullah SAW, hingga saat ini menunjukan

³⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 114.

³⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 103.

³⁶ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, h.75.

³⁷ Khotibul Umum, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2016), h. 104.

³⁸ Fathurohman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 127.

bahwa umat telah sepakat akan disyariatkan jual beli.³⁹ Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

أَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum dasar dalam muamalah adalah kebolehan (ibahah) sampai ada dalil yang melarangnya”.

Pendapat yang telah diuraikan diatas dapat dijadikan dasar/hujjah dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan jual beli. Dari dasar hukum diatas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah, artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja didalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan dalam jual beli dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan hukum Islam.

3. Rukun Dan Syarat Jual beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli,⁴⁰ oleh karena itu jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara’.

a. Rukun Jual beli

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat beberapa perbedaan pendapat ulama. Diantaranya ulama Hanafiyah dengan Jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/tara’dhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual

³⁹ Beni Ahmad Saebani, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 59-60.

⁴⁰ Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam*, h. 104.

beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk di indera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka, boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang(*ta'athi*)

- 1) Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu;
 - a) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli),
 - b) Ada Sighat (lafal *Ijab* dan *qabul*)
 - c) Ada barang yang di beli
 - d) Ada nilai tukar pengganti barang.
- 2) Menurut ulama hanafiyah, orang yang berakad, barang yang di beli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.⁴¹

b. Syarat-syarat Jual beli

Syarat dalam jual beli itu dibolehkan, oleh karena itu jika sifat yang disyaratkan itu memang ada maka jual beli sah dan jika tidak ada maka jual beli tidak sah.⁴² Jadi di dalam jual beli harus memenuhi beberapa syarat di antara lain.

- 1) Syarat orang yang berakad

Akad berasal dari kata *al-aqd*, yang berarti mengikat , menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Menurut pasal 262 *Mursyid al-*

⁴¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 114-115.

⁴²Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik*, h.77.

Hairan, akad merupakan, pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad⁴³ Kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli haruslah:

a) Berakal

Berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal⁴⁴, anak di bawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api, dll. hal ini berdasarkan firman Allah (QS. An-nisa (4): 5)

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوا
هُمْ مِنْهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥)

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.

Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”⁴⁵

⁴³Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Study Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, Cet. 2 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010) h. 68.

⁴⁴Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 139-140.

⁴⁵Mardani, *Fiqh Ekonom Syariah*, h. 103.

b) Yang melakukan akad orang yang berbeda

Orang yang melakukan akad ialah seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli. Misalnya Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri. Jual beli seperti ini adalah tidak sah.⁴⁶

c) Dengan kehendaknya sendiri (bukan paksaan)⁴⁷

Maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri.⁴⁸ Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah. Hal ini sebagaimana firman Allah (QS. An-Nisa (4):29)



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayangkepadamu.”⁴⁹

d) Keduanya tidak mubazir

Maksudnya pihak yang melakukan perjanjian jual beli tidaklah boros karena hal ini nantinya akan berakhir mubazir. Mubazir

⁴⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 114-115.

⁴⁷Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet.1 (Jakarta: Raja Grafindo), h. 29.

⁴⁸Khumedhi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 4,(Permatanet Publishing, 2016), h.103.

⁴⁹Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 139-140.

dalam hukum dikategorikan seseorang yang tidak cakap bertindak perbuatan hukum yang tidak bisa dilakukan sendiri. Orang boros (mubazir) didalam perbuatan hukum harus berada dibawah pengampuan/perwalian. Hal itu sesuai dengan ketentuan hukum: “janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”(QS. An-nisa (4): 5).⁵⁰

e) Baligh

Menurut hukum Islam (fiqih), dikatakan baligh (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut di perbolehkan untuk melakukan perbuatan jual-beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.. Hal ini sebagaimana firman Allah (QS Al – Baqarah (2):185)

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

⁵⁰*Ibid.* h. 141-142.

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan atau kesukaran bagimu”⁵¹

f) Beragama Islam

syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, firman-Nya (QS An-Nisa (4):141)

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin".⁵²

2) Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul

Akad ialah kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan⁵³ ucapan, tulisan, isyarat, perbuatan, atau cara lain, yaitu pihak yang satu menyatakan kehendaknya sebagai tanggapan terhadap kehendak pihak pertama. Pernyataan kehendak pertama dinamakan

⁵¹Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, h. 103.

⁵²Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*....., h.80.

⁵³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 70-75.

ijab dan pernyataan kehendak yang kedua sebagai jawaban terhadap pernyataan kehendak yang pertama dinamakan kabul.⁵⁴

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul, Rasulullah Saw. Bersabda

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَفْتَرِقَانِ إِذَا
تَرَاضَا إِلَّا عَنْ {رواه أبو داود و الترمذي}

Dari abi hurairah r.a dari Nabi Saw Bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi)

Rasulullah Saw. Bersabda sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan (Riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah)

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan qabul, ini adalah pendapat jumhur. Menurut fatwa ulama Syaf'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab dan kabul, tetapi menurut imam Al-Nawawi dan ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan kabul seperti membeli sebungkus rokok.

⁵⁴Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Study Tentang Teori Akad*, h. 124.

Masalah ijab dan kabul ini para ulama fiqh berbeda pendapat, diantaranya berikut ini

a) Menurut ulama Syafi'iyah ijab dan kabul adalah

Tidak sah akad jual beli kecuali dengan shigat (ijab kabul) yang diucapkan

b) Imam Malik berpendapat

Bahwa jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja

c) Penyampaian akad dengan perbuatan atau disebut juga dengan

aqad bi al-mu'athah, yaitu Aqad bi al-mu'athah ialah mengambil dan memberikan dengan tanpa perkataan (ijab dan kabul), sebagaimana seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dari penjual dan memberikan uangnya sebagai pembayaran.

Bentuk yang ketiga ini lebih diartikan ijab dan kabul dengan *mubadallah* karena yang diutamakan pertukarannya.⁵⁵

Syarat Syarat Sah Ijab Kabul ialah sebagai berikut

a) Tidak ada yang memisahkan, antara penjual dan pembeli,

b) Jangan diselingi kata kata lain antara ijab dan kabul.

c) Harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul.⁵⁶

d) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal, menurut ulama hanafiah; sesuai

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 70-75.

⁵⁶ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* h. 103.

dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan aqad.

e) Ijab dan qabul harus jelas dan lengkap. Ijab qabul harus dapat di terima oleh kedua belah pihak.⁵⁷

3) Syarat barang yang di perjual belikan

Benda-benda atau barang yang di perjual belikan (*ma'kud 'alaih*).

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut.

a) Suci atau bersih barangnya

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa mazhab Hanafi dan Mazhab Zahiri mengecualikan barang-barang bermanfaat, dapat dijadikan sebagai objek jual beli. Untuk itu, mereka mengatakan “diperbolehkan seorang penjual kotoran. Kotoran/tinja dan sampah yang mengandung najis karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan, barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapihan dan pupuk tanam.”

Meskipun demikian, perlu diingatkan bahwa barang itu (barang-barang yang mengandung najis, arak, dan bangkai) boleh di perjual belikan sebatas bukan untuk di konsumsi atau dijadikan sebagai bahan makanan.

b) Dapat dimanfaatkan

Benda yang dapat di manfaatkan seperti untuk di konsumsi, dinikmati keindahannya, dinikmati suaranya, serta dipergunakan

⁵⁷ *Ibid.* h. 110-111.

untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu.⁵⁸ batu berhala pun jika di pecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, Thawus dan Mujahid berpendapat bahwa kucing haram di perdagangkan alasannya hadis shahih yang melarangnya, jumhur ulama membolehkannya selama kucing tersebut bermanfaat. Larangan dalam hadist shahih dianggap sebagai *tanzih (makruh tanzih)*

Dengan demikian yang dimaksud dengan barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut dengan ketentuan hukum agama (syariat Islam) atau pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama (Islam) yang berlaku.⁵⁹ maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara, seperti menjual babi, kala, cicak dan yang lainnya.

- c) Tidak dibatasi waktunya.
- d) Dapat serahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar.
- e) Milik sendiri.
- f) Diketahui (dilihat), barang yang di perjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran

⁵⁸Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 143.

⁵⁹Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, h. 108-109.

yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak⁶⁰ atau jual beli yang mengandung penipuan⁶¹

g) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.⁶²

h) Barang atau benda yang diperjual belikan tidak boleh dikembalikan.⁶³

4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Nilai tukar dari barang yang di jual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqih membedakan *ats-tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka, *tsa-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (*consumption*). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual dipasar).

Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *ats-tsaman*. Sebagai berikut :

(1) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.

⁶⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 71.

⁶¹Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* ..., h. 110.

⁶²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 118.

⁶³Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, h. 110.

- (2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- (3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadha*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar; karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.⁶⁴

4. Macam–Macam Jual beli

Jual beli yang sah apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan; bukan milik orang lain, tidak tergantung pada *khiyar*.⁶⁵

a. Ditinjau dari segi hukumannya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli di bagi menjadi 3 macam yaitu; jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual beli benda yang tidak ada.⁶⁶

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, seperti membeli beras di pasar.

⁶⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 118-120.

⁶⁵*Ibid.* h.121.

⁶⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.79.

- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan).⁶⁷ Uang diserahkan lebih dulu, sebelum barang datang.⁶⁸
- 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak di perbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Syarbini Khatib yaitu perbuatan *gharar*⁶⁹

b. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek)

Segi pelaku akad (subjek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.

- 1) Jual beli dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga, menunjukkan apa yang ada di dalam hati *aqid*. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca, akad tidak sah).⁷⁰
- 2) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli *salam*, hanya saja jual beli *salam* antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu

⁶⁷ *Ibid.* h.80.

⁶⁸ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, h. 113.

⁶⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, Jilid III, terj. Mad'Ali, Cet . (Bandung: Triganda Karya, 1997), h. 434.

⁷⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 96.

majelis akad, sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.⁷¹

- 3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'atha* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul.⁷² menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab kabul terlebih dahulu.

Jual beli juga ada yang di bolehkan dan ada yang dilarang jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tetapi sah.⁷³

a) Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya

- 1) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar, Rasulullah Saw. Bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنَازِيرِ وَالْأَصْنَامِ

"Dari jahir r.a, Rasulullah Saw. Bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasul-nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala (riwayat Bukhori dan Muslim)."⁷⁴

⁷¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 78.

⁷²Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 95.

⁷³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 78.

⁷⁴Muhammad Asy-Syarbini, Mugni Al-Muuhtoj, Juz, h. 2.

- 2) Jual beli sperma (mani) hewan. Jual beli ini haram hukumnya karena Rasulullah saw. Bersabda

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ
(رواه البخاري)

Dari Ibnu R.a., berkata; Rasulullah saw. Telah melarang menjual mani binatang (riwayat bukhori).⁷⁵

- 3) Jual beli anak binatang yang masi berada di dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya tidak tampak, juga Rasulullah saw. Bersabda;

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ
(رواه البخاري و مسلم)

Dari Ibnu Umar r.a Rasulullah saw, telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya (riwayat Bukhori dan Muslim).

- 4) Jual beli dengan *Muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi yang kering dengan bayaran padi basah sedangkan ukurannya dengan di kilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Hal ini dilarang oleh Rasulullah Saw. Dengan sabdanya:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُخَا قَلَّةٍ وَالْمُخَا ضَرَّةٍ
وَالْمُلَا مَسَّةٍ وَالْمُنَا بَذَّةٍ وَالْمُزَّ أَبْنَّةٍ . (رواه البخاري)

⁷⁵Al-Tarmizi, Sunan Al-Tirmidzi, Juz 3, Maktabah Kutub Al-Mutun (Al-Mutun), h.54.

Dari anas r.a, ia berkata; Rasulullah saw. Melarang jual beli *muhaqallah*, *mukhadharah*, *Mulammassah*, *munabazah* dan *muzabanah* (riwayat Bukhori).⁷⁶

- 5) Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- 6) Jual beli *Munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti ku lemparkan pula padamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar melempar, terjadi jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada *ijabb* dan *qabul*.
- 7) Jual beli dengan *Muhaqallah*, berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *Muhaqallah* disini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan *riba* di dalamnya.
- 8) Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk di panen, seperti menjual rambutan yang masi hijau, mangga yang masi kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masi samar, dalam artian mungkin

⁷⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 215.

saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.⁷⁷

- 9) Menentukan dua harga untuk satu barang yang di perjual belikan. Menurut syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata; ku jual buku ini seharga \$10,- dengan tunai atau \$15,- dengan cara utang". Arti kedua ialah seperti seseorang berkata."Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku". Dari abi hurairah, ia berkata; rasulullah saw. Bersabda, barang siapa yang menjual dengan dua harga dengan satu penjualan barang, maka baginya ada kerugia atau riba". (riwayat abu dawud).

- 10) Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu. Rasulullah Saw. Melarang jual beli makanan yang dua kali di takar, dengan takaran penjual dan takaran pembeli (Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni).

- 11) Jual beli dengan syarat (*Iwadh Mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja

⁷⁷Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 120-124.

disini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata, “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku.” Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga yang kedua menurut al-syafi’i.⁷⁸

- 12) Jual beli *gharar*, kata *gharar* berarti hayalan atau penipuan tetapi juga berarti resiko dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu spekulasi atau resiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan penyebab tak dapat ditentukan, adalah dilarang karena mengandung resiko yang terlampau besar dan tidak pasti. *Gharar* dilarang dalam Islam bukan untuk menjauhi resiko. Tentu saja resiko yang sifatnya komersil disetujui dan didukung dalam Islam. Setiap jenis kontrak yang bersifat *open-ende* mengandung unsur *gharar*.⁷⁹

- 13) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang di jual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang di kecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada di kebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang di kecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (majhul), jual beli tersebut batal.
- Rasulullah Saw. Bersabda:

⁷⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 80.

⁷⁹Efa Rodhiah Nur, *Riba dan Gharat*, dalam Jurnal Al-Adalah Hukum Islam, Vol.XII, No.3, Juni 2015, h.456.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمَخَاضَرَةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

رواه البخارى

"Rasulullah melarang jual beli dengan mahaqallah, mudzabanah, dan yang dikecualikan, kecuali bila di tentukan (Riwayat Nasai)."

14) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara dan ikan yang di air. Jual beli tersebut tidak sah karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.⁸⁰

b) Jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut.

(1) Membeli benda-benda kepada penjual yang belum memasuki pasar, dengan harga semurah-murahnya dan kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Hal sering terjadi di perbatasan antara kota dan kampung. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa. Rasulullah Saw. Bersabda:

قَالَ □ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا □ يَبِيعُ حَا ضِيرٌ

لِبَادٍ

⁸⁰Al-Tarmizi, Sunan Al-Tirmidzi, Juz 3, Maktabah Kutub Al-Mutun (Al-Mutun), h.54.

Artinya: Tidak boleh menjualkan orang hadir (orang dikota) barang orang dusun (baru datang) (riwayat Bukhori dan Muslim)

(2) Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain, dengan harga yang tinggi. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain. Rasulullah Saw. Bersabda "Tidak boleh seseorang menawar diatas tawaran saudaranya" (riwayat Bukhori dan Muslim)

(3) Jual beli dengan Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama. Rasulullah Saw. Bersabda "Telah melarang melakukan jual beli dengan *Najasyi*" (riwayat Bukhori dan Muslim)

(4) Menjual diatas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: "kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu. Rasulullah Saw bersabda: Seseorang tidak boleh menjual atas penjualan orang lain (Riwayat Bukhori dan Muslim)⁸¹

c) Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhaili meringkasnya sebagai berikut.

(1) Jual beli orang gila. Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli di orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, skalor dan lain-lain.

⁸¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 79-81.

- (2) Jual beli anak kecil, Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil (*mumayyiz*) di pandang tidak sah, kecuali dalam perkara sepele. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak *mumayyiz* yang belum baligh tidak sah sebab tidak ada ahliyah. Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya.
- (3) Jual beli orang buta, dikategorikan sah menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya) adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik, sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan barang yang baik.
- (4) Jual beli terpaksa menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa. Seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa seijin pemiliknya), yakni di tanggungkan (*mauquf*). Jual beli *fudhul* tidak sah.
- (5) Jual beli orang yang terhalang, maksud terhalang disini karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit. Jual-beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling sah dikalangan Hanabilah, harus di tangguhkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya di pandang tidak dapat di pegang. Begitu pula di tangguhkan jual beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama malikiyah dan Hanafiyah, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah,

jual beli tersebut tidak sah. Menurut Jumhur selain Malikiyah, jual beli orang sakit parah yang sudah mendakati mati hanya di bolehkan sepertiga dari hartanya (*tirkah*), dan bila ingin lebih dari sepertiga, jual beli tersebut ditangguhkan kepada izin ahli warisnya. Menurut ulama Malikiyah, sepertiga dari hartanya hanya di bolehkan pada harta yang tidak bergerak, seperti rumah, tanah, dan lain-lain.

- (6) Jual beli *malja*, adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual-beli tersebut *fasid*, menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.⁸²

B. Etika Bisnis Dalam Islam

1. Pengertian Etika Bisnis

Etika berasal dari kata⁸³ *ethikos* dalam bahasa Yunani kuno yang artinya timbul dari kebiasaan⁸⁴ (*custom*) atau karakter (*character*).⁸⁵ Menurut Istiyono Wahyu dan Ostaria etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar salah, baik buruk, dan tanggung jawab. Etika adalah ilmu berkenaan tentang yang buruk dan tentang hak kewajiban moral. Menurut Rafik Issa Bekum, etika dapat di definisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dari buruk. Etika adalah bidang

⁸²Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 94.

⁸³Faisal Badroen, et. al. *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 4.

⁸⁴Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business*, h.2

⁸⁵Faisal Badroen, et. al. *Etika Bisnis dalam Islam*, h. 4.

ilmu yang bersifat normatif, karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.

Menurut kamus, istilah etika memiliki beragam makna. Salah satu maknanya adalah “prinsip tingkah laku yang mengatur individu dan kelompok”. Makna kedua menurut kamus, etika adalah “kajian moralitas” meskipun etika berkaitan dengan moralitas, namun tidak sama persis dengan moralitas. Etika adalah semacam penelaahan, baik aktivitas penelaahan maupun hasil penelaahan itu sendiri, sedangkan moralitas merupakan subjek. Etika merupakan ilmu yang mendalami standar moral perorangan dan standar moral masyarakat.⁸⁶

Etika yang berarti adat kebiasaan merupakan bagian dari filsafat. Menurut Webster Dictionary etika ialah ilmu tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip yang di sistematisir tentang tindakan moral yang benar.

Letak perbedaan ahlak dan etika ialah etika merupakan cabang dari filsafat yang berarti tolak dari akal pikiran, sedangkan akhlaq ialah suatu ilmu pengetahuan yang mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk, berdasarkan ajaran dari Allah dan Rasul.⁸⁷

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa etika adalah suatu hal yang di lakukan secara benar dan baik, tidak melakukan suatu

⁸⁶Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business*, h. 3.

⁸⁷ Buchari Alma, *dasar-dasar etika bisnis Islam*, Cet.3.(Bandung: Alfabeta, 2003) h.54.

keburukan, melakukan hak kewajiban sesuai dengan moral dan melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab.⁸⁸

Bisnis dapat didefinisikan sebagai pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Apa yang mengartikan, bisnis sebagai suatu organisasi yang menjalankan aktifitas produksi dan distribusi atau penjualan barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit (keuntungan). Barang yang dimaksud adalah suatu produk yang secara fisik memiliki wujud (dapat di indra) sedang jasa adalah aktifitas-aktifitas yang memberi manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis lain.

Dapat di pahami bahwa setiap pelaku bisnis akan melakukan aktivitas bisnisnya dalam bentuk; pertama, memproduksi dan atau mendistribusikan barang dan atau jasa; kedua, mencari profit (keuntungan); dan ketiga mencoba memuaskan keinginan konsumen.⁸⁹

Dari uraian panjang diatas, disini dapatlah kita mendefinisikan etika bisnis sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas.⁹⁰

2. Etika Bisnis Menurut Al-Qur'an dan Hadist

Sedangkan dalam Islam, etika adalah akhlak seorang muslim dalam melakukan semua kegiatan termasuk dalam bidang bisnis. Oleh karena itu, jika ingin selamat dunia dan akhirat, kita harus memakai etika di dalam

⁸⁸Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business....*, h. 3.

⁸⁹Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business*, h. 11-13.

⁹⁰Faisal Badroen, et. al. *Etika Bisnis dalam Islam....*, h. 16

keseluruhan aktivitas bisnis kita.⁹¹ Secara terminologis arti kata etika sangat dekat pengertiannya dengan istilah Al-Qur'an *al-khuluq*. Untuk mendeskripsikan konsep kebijakan, Al-Qur'an menggunakan sejumlah terminologi sebagai⁹² berikut *khair* (kebaikan), *bir* (kebenaran), *qist* (persamaan), *'adl* (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (kebenaran dan kebaikan), *ma'ruf* (mengetahui dan mengikuti), dan *taqwa* (ketakwaan). Tindakan yang terpuji disebut sebagai *salihat* dan tindakan yang tercela disebut sebagai *sayyi'at*.⁹³

Ada empat pilar etika *management* bisnis menurut Islam seperti yang di ceritakan nabi Muhammad Saw. Pertama, 'tauhid' yang berarti memandang bahwa segala aset dari transaksi bisnis yang terjadi di dunia adalah milik Allah, manusia hanya mendapatkan amanah untuk mengolahnya. Kedua, 'adil', artinya segala keputusan menyangkut transaksi dengan lawan bisnis atau kesepakatan kerja harus di landasi dengan 'akad saling setuju'. Dengan sistem profit and lost sharing. Pilar ketiga adalah 'kehendak bebas'. Management Islam mempersilakan umatnya untuk menumpahkan kreativitas dalam melakukan transaksi bisnis sepanjang memenuhi asas hukum ekonomi Islam, yaitu halal. Dan keempat adalah 'pertanggung jawaban.' Semua keputusan seorang pimpinan harus di pertanggungjawabkan oleh bersangkutan.⁹⁴

⁹¹Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business*, h. 3.

⁹²Faisal Badroen, et. al. *Etika Bisnis dalam Islam*, h. 6.

⁹³ Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business*.....,h. 3-4

⁹⁴ Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, (Bandung: Rekayasa Sains Bandung, 2007), h. 58.

Madjid Fakhri, etika merupakan gambaran nasional mengenai hakikat dan dasar perbuatan dan keputusan yang benar, serta prinsip-prinsip yang menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan secara moral yang diperintah dan di larang. Inilah norma dan etika sebagai hakikat dan ajaran-ajaran Islam dalam Ekonomi. Etika merupakan jiwa ekonomi Islam yang membangkitkan kehidupan dalam sebuah peraturan dan syariat. Oleh sebab itu, etika atas akhlak adalah hakikat-hakikat yang menempati ruang luas dan mendalam kepada akal, hati nurani, dan perasaan seorang muslim.⁹⁵

Sebenarnya perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi laranganNYA. Dalam Islam etika Bisnis ini sudah banyak dibahas dalam berbagai literatur dan sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan sunaturrasul.

Pelaku-pelaku bisnis di harapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya artinya usaha yang ia lakukan harus mampu memupuk atau membangun tingkat kepercayaan dari para relasinya. Kepercayaan, keadilan dan kejujuran adalah elemen pokok dalam mencapai suksesnya suatu bisnis di kemudian hari. Sebuah perusahaan bisnis harus ada etika dalam menggunakan sumber daya yang terbatas, dan apa akibat dari pemakaian sumber daya tersebut, apa akibat dari proses produksi yang menimbulkan polusi, diharapkan orang bisnis memiliki standar etik yang

⁹⁵Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business....*, h. 3.

lebih tinggi, karena mereka langsung berhadapan dengan masyarakat, yang selalu mengawasi kegiatan mereka.

Singapura, merupakan sebuah negara yang hidup dari bisnis. Mereka betul-betul membuat negaranya terkenal karena jujur, sehingga negara-negara lain di Eropa, dan Amerika mengimpor komoditi lewat Singapura. Ini disebabkan karena mereka lebih mempercayai pelaku bisnis Singapura dari pada pelaku bisnis dari mana produk yang mereka impor berasal. Jadi Indonesia Misalnya harus menjual produknya ke Singapura dulu, baru kemudian di ekspor lagi kenegara lain. Negara pengimpor yang minta dikirim komoditi dari Singapura menganggap Singapura, lebih tepat janji, lebih handal, lebih transparan, lebih jujur dan etika bisnisnya dianggap setara dengan negara pengimpor tadi. Ini betul-betul sangat memukul bangsa kita yang sebagian besar beragama Islam, tapi dari segi etika pelaku bisnisnya sangat rendah, sehingga kurang kepercayaan untuk mengekspor langsung ke negara tujuan, tapi harus melewati Singapura lebih dulu.

Terhadap uraian mengenai istilah ini kita kutip pandangan Hamzah Ya'kub dalam bukunya etika Islam, perkataan akhlak berasal dari bahasa Arab, yang diartikan sama dengan budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Pengertian akhlak ialah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, antara yang terpuji dan tercela, tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin. ⁹⁶

⁹⁶ Buchari Alma, *Dasar-dasar etika bisnis Islam*, h. 52-53.

Islam mewajibkan muslim (khususnya) mempunyai tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia mencari nafkah (rezeki). Allah melapangkan bumi dan seisinya dengan berbagai fasilitas yang dapat di manfaatkan oleh manusia untuk mencari rezeki, diantara sumber daya alam yang diserahkan kepada manusia untuk dimanfaatkan antara lain: hewan (qs.an-hal: 5,66, 68-69), tumbuh-tumbuhan (qs.an-hal:67, kekayaan laut (qs an-hal:14), kekayaan alam tambang (qs al-hadi:25), (qs al-kahfi:96-97).

Disamping anjuran untuk mencari rezeki, dan Islam juga sangat menekankan atau mewajibkan aspek kehalalan, baik dari segi perolehan maupun pendaayagunaannya (pengolahannya dan pembelanjaan). Sebagaimana hadis Nabi saw, bahwa : kedua telapak kaki anak adam dihari kiamat masi belum beranjak sebelum ditanya kepadanya lima perkara; tentang umurnya; apa yang dilakukannya, tentang masa mudanya, apa yang dilakukannya, tentang hartanya, dari mana di perolehnya dan untuk apa di belanjakannya dan tentang ilmunya; apa yang dia kerjakan dengan ilmunya.

Dari pengertian diatas, bisnis Islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak di batasi), namun di batasi dalam cara perolehan dan pendaayaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat (aturan-aturan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis) dengan

kata lain syariat merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis maupun taktis bagi pelaku kegiatan ekonomi (bisnis)⁹⁷

Dari uraian panjang diatas, disini dapatlah kita mendefinisikan etika bisnis sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas⁹⁸ khususnya dalam perilaku dan tindakan-tindakan ekonomi, bersumber terutama dari ajaran agama. Itulah sebabnya banyak ajaran dan paham dalam ekonomi barat menunjuk pada kitab injil (Bible), dan etika ekonomi Yahudi banyak menunjuk pada Taurat. Demikian pula etika ekonomi Islam termuat dalam lebih dari seperlima ayat-ayat yang di muat dalam Al-Qur'an.

Etika bisnis menurut ajaran Islam digali langsung dari Al-Qur'an dan Hadits nabi. Dalam ajaran Islam, etika bisnis dalam Islam menekankan pada empat hal yaitu: kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kebebasan (*free will*), dan tanggung jawab (*responsibility*).

Etika bisnis Islam menjunjung tinggi semangat saling percaya, kejujuran, dan keadilan, sedangkan antara pemilik perusahaan dan karyawan berkembang semangat kekeluargaan (*brotherhood*). Misalnya dalam perusahaan yang Islami gaji karyawan dapat dapat di turunkan jika perusahaan benar-benar merugi dan karyawan juga mendapat bonus jika keuntungan perusahaan meningkat. Buruh muda yang masih tinggal bersama orang tua dapat di bayar lebih rendah, sedangkan yang sudah

⁹⁷ Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business*, h. 11-13.

⁹⁸ Faisal Badroen, et. al. *Etika Bisnis dalam Islam*...., h. 16.

berkeluarga dan punya anak dapat dibayar lebih tinggi dibanding rekan-rekannya yang muda.⁹⁹

Sebelum menjadi rasul, profesi nabi muhammad adalah berdagang yang sudah dia lakukan sejak usia 12 tahun. Dalam berdagang, Nabi dikenal sebagai pedagang yang jujur sehingga mendapat julukan *Al-Amien*.

Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat bisnis dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai 'daratan' atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.¹⁰⁰ Standar etika bisnis tersebut diterapkan kedalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dan diterapkan kepada orang-orang yang ada dalam organisasi.¹⁰¹

3. Konsep Etika Bisnis Islam

Konsep Peran Manusia Untuk memahami etika usaha yang Islami, terlebih dahulu harus di pahami peran (dan tugas) manusia di dunia. Allah swt. Telah berfirman dalam (Q.S Adz-zariyat (51): 56)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku"

⁹⁹ Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Etika Bisnis dan Tanggung*, h. 56.

¹⁰⁰ Faisal Badroen, et. al. *Etika Bisnis dalam Islam*, h. 16.

¹⁰¹ Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business*, h. 4.

Ayat ini menegaskan, bahwa Allah swt tidaklah menjadikan jin dan manusia melainkan untuk mengenal-Nya dan supaya menyembah-Nya. Hal ini diterangkan juga dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh mujahid, sebagai berikut.

كنت كنزاً لا أعرِف، فأحببت أن أعرِف فخلقت خلقاً فعرَفْتهم بي فعرَفوني

"Aku laksana perbendaharaan yang tersembunyi, lalu aku ingin supaya diketahui, maka kujadikanlah makhluk, maka dengan adanya (ciptaan-Ku) itulah mereka mengetahui-Ku (tafsir al maragi)"

Firman Allah swt (Q.S At-Taubah (9): 31)

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

Artinya: "Padahal mereka hanya disuruh menyembah tuhan yang esa, tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan."

Maksud ayat diatas, mereka mematuhi ajaran-ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta, biarpun orang-orang alim dan rahib-rahib itu menyuruh membuat maksiat atau mengharamkan yang halal. Pendapat ini sama dengan pendapat Az Zajjaj, tetapi ahli tafsir yang lain berpendapat, bahwa Allah swt. Tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk tunduk kepada-Nya dan untuk merendahkan diri, setiap makhluk, baik jin atau manusia, wajib tunduk kepada peraturan tuhan yang

merendahkan diri terhadap kehendaknya. Menerima apa yang ia takdirkan, mereka dijadikan atas kehendaknya dan diberi rezeki sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Tidak seorang pun dapat memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat, karena kesemuanya atas kehendak Allah swt. Ayat tersebut menguatkan perintah mengingat Allah swt. Dan menghimbau manusia supaya melakukan ibadah kepada Allah.

4. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum

Kesadaran hukum serta kepatuhan hukum merupakan dua variabel yang mempunyai hubungan korelasi.

A. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum ialah konsepsi-konsepsi abstrak didalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan nilai-nilai yang meyangkut bidang-bidang politik, ekonomi, sosial dan seterusnya. Hukum pada hakikatnya merupakan konkretisasi dari sistem nilai-nilai, khususnya nilai-nilai hukum suatu masyarakat, demikianlah keadaannya yang ideal, meskipun kenyataannya tidaklah selalu demikian. Sistem nilai-nilai tersebut, merupakan inti dari sistem budaya suatu masyarakat khususnya aspek spiritual dari sistem budaya masyarakat.

Oleh karena itu, maka dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan inti daripada sistem budaya suatu

masyarakat, sehingga ada yang berpendapat bahwa sistem budaya merupakan suatu sistem normatif. Kesadaran hukum itulah yang menimbulkan berbagai sistem norma-norma, oleh karena inti dari kesadaran hukum adalah hasrat yang kuat untuk senantiasa hidup secara teratur.

Oleh karena hukum adat merupakan bagian dari adat atau adat istiadat, maka dapat dikatakan bahwa hukum adat merupakan konkretisasi dari kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat-masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana.

Disamping itu, ada kecenderungan bahwa hukum (adat) timbul dari masyarakat dan kebanyakan warga masyarakat hidup didalam sistem tersebut. Mereka mengetahui, memahami, menaati, dan menghargai hukum tersebut. Keadaannya adalah berbeda dengan hukum positif tertulis yang kebanyakan berasal negeri Belanda (atas dasar konkordansi), yang merupakan hukum asing bagi warga masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana tersebut. Akibatnya, maka ada unsur-unsur kalangan hukum tertentu di Indonesia yang menyatakan bahwa kebanyakan warga masyarakat Indonesia buta hukum positif tertulis.¹⁰²

Kesadaran hukum akan terwujud apabila ada indikator pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum, yang patuh terhadap hukum. Secara teori ketiga indikator inilah yang dapat

¹⁰²Suriyaman Mustari, *Hukum Adat ...*, h. 151-154

dijadikan tolak ukur dari kesadaran hukum, karena jika pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukumnya rendah maka kesadaran hukumnya rendah atau sebaliknya.

Kesadaran hukum yang rendah atau tinggi pada masyarakat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Kesadaran hukum yang rendah akan menjadi kendala dalam pelaksanaan hukum, baik berupa tingginya tingkat pelanggaran hukum maupun kurang berpartisipasinya masyarakat dalam pelaksanaan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto : "kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi."

Hal tersebut berkaitan dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat atau efektivitas dari ketentuan hukum di dalam pelaksanaannya. Seseorang yang mempunyai kesadaran hukum, akan memiliki penilaian terhadap hukum yang dinilainya dari segi tujuan dan tugasnya. Penilaian semacam ini adalah pada setiap warga masyarakat, oleh karena itu manusia pada umumnya mempunyai hasrat untuk senantiasa hidup dengan teratur.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang diharapkan ada. Dengan demikian, jelaslah bahwa kesadaran hukum sebetulnya menjadi dasar bagi penegakan hukum sebagai proses.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum, seyogianya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar rencana yang mantap. Penerangan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui mengenai hukum tertentu, seperti peraturan perundang-undangan tertentu, mengenai perkawinan, pajak, perburuhan, kehutanan dan narkoba yang dijelaskan melalui penerangan hukum.

Adapun penyuluhan hukum merupakan kelanjutan dari penerangan hukum yang bertujuan agar masyarakat mengerti akan hukum, memiliki keberanian, dan memahami cara untuk menegakkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya serta manfaatnya apabila hukum di taati. Disamping itu, agar hukum yang berlaku benar-benar mencerminkan keserasian jalinan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.

Keserasian jalinan nilai-nilai merupakan keserasian antara dua nilai yang berpasangan, seperti dalam masalah lalu lintas terdapat nilai kecepatan dengan nilai keselamatan. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana menyempikan hukum agar dapat menjadi patokan perikelakuan dan juga mencerminkan keserasian nilai-nilai yang dianut oleh suatu khalayak tertentu.¹⁰³

Kesadaran hukum diartikan sebagai persepsi hukum dari seorang persepsi hukum dari seorang individu atau masyarakat

¹⁰³Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 249-250

terhadap hukum, sebagaimana Soerjono Soekanto mengkonsepsikan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia dan masyarakat tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Penekanannya adalah pada sisi nilai-nilai atau tentang fungsi hukum, dan bukan pada penilaian hukum terhadap kejadian bersangkutan. Kesadaran hukum merupakan dasar bagi penegakan hukum sebagai proses.

Konsepsi tersebut mengarahkan term "hukum" pada hukum yang berlaku dan hukum yang di cita-citakan (*ius constitutum* dan *Ius constituendu*) meliputi hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Misalnya antara hukum Islam dan hukum Adat dengan peraturan perundang-undangan. Masyarakat menjalankan atau menaati hukum bukan karena adanya paksaan melainkan karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri yang telah diinternalisasikan.

Kesadaran hukum menjadi pedoman bagi penegak hukum dan ketaatan hukum (efektifitas hukum). Hal ini berarti bahwa kesadaran hukum masyarakat menjadi parameter utama dalam proses penataan hukum. Bukan karena rasa takut akan sanksi melainkan karena kesadaran bahwa hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sehingga hukum harus ditaati.

Indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum dalam masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, yaitu:¹⁰⁴

- 1) Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*)
- 2) Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum/ pemahaman hukum (*law acquaintance*)
- 3) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*)
- 4) Pola perilaku hukum (*legal behavior*)¹⁰⁵

Dengan demikian, masa transisi masyarakat ke arah modernisasi, membawa pengaruh terhadap praktik pola kesadaran hukum masyarakat.¹⁰⁶

Asal Mula Permasalahan Paham kesadaran hukum sebenarnya berkisar pada pikiran-pikiran yang menganggap, bahwa kesadaran dalam diri warga- warga masyarakat merupakan suatu faktor yang menentukan bagi sahnya hukum. Pada awalnya masalah kesadaran hukum timbul di dalam proses penerapan dari pada hukum positif tertulis. Di dalam kerangka proses tersebut timbul masalah, oleh karena adanya ketidaksesuaian antara dasar sahnya hukum (yaitu pengendalian sosial dari penguasa atau kesadaran warga masyarakat) dengan kenyataan-kenyataan di patuhinya (atau tidak ditaatinya) hukum positif tertulis tersebut. Merupakan suatu keadaan yang di cita-citakan atau di kehendaki, bahwa ada keserasian proporsional

¹⁰⁴ Suriyaman Mustari, h. 162-164

¹⁰⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cet. 12, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 320-321

¹⁰⁶ Suriyaman Mustari, *Hukum Adat*, h. 164-165.

antar pengendalian sosial oleh penguasa, kesadaran warga masyarakat dan kenyataan dipatuhinya hukum positif tertulis. Ide tentang kesadaran warga-warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis ditemukan di dalam ajaran-ajaran tentang *Recht sgefuhl* atau *Rechtsbewusstsein* yang intinya adalah, bahwa tak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum.

Tentang masalah ini Krabbe menyatakan, bahwa selain dari pada kekuasaan dewa-dewa dan wewenang publik, maka ada wewenang lain yaitu kesadaran manusia. Kesadaran tersebut telah begitu menjiwai dan mendarah daging, sehingga mempunyai kekuatan yang lebih besar dari pada wewenang biasa yang didasarkan pada *prestise*. Kenyataan tersebut semakin berkembang, terutama dalam kehidupan spiritual manusia dewasa ini.

Konsepsi negara kesejahteraan mengandung ciri-ciri sebagai berikut

- a) Pemisahan kekuasaan berdasarkan *trias politica* dipandang tidak prinsip lagi. Pertimbangan-pertimbangan *efesiensi* kerja lebih penting dari pada pertimbangan-pertimbangan dari sudut politis, sehingga peranan organ-organ eksekutif lebih penting dari pada organ-organ legislatif.
- b) Peranan negara tidak hanya terbatas pada menjaga keamanan ketertiban belaka, akan tetapi negara secara aktif berperan

dalam penyelenggaraan kepentingan-kepentingan masyarakat di bidang-bidang kecil sosial, ekonomi dan budaya, sehingga perencanaan merupakan sarana yang sangat penting.

- c) Negara kesejahteraan merupakan negara hukum materil yang mementingkan keadilan sosial materil dan bukan persamaan yang bersifat formal semata-mata.
- d) Sebagai konsekuensi dari hal-hal tersebut diatas, maka di dalam suatu negara kesejahteraan hak milik tidak lagi di anggap sebagai hak yang mutlak, akan tetapi hak tersebut di pandang mempunyai fungsi sosial yang berarti adanya batas-batas di dalam kebebasan penggunaan.
- e) Adanya kecendrungan bahwa peranan hukum publik semakin penting dan semakin mendesak peranan hukum perdata. Hal ini disebabkan karena semakin luasnya peranan negara di dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.

B. Kepatuhan Hukum

1) Suatu Orientasi

Di dalam sosiologi, maka masalah kepatuhan terhadap kaidah-kaidah telah menjadi pokok permasalahan yang cukup banyak dibicarakan. Menurut Bierstedt dasar-dasar kepatuhan hukum yaitu

- a) *Indoctrination*

sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia diberi indoktrinasi untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya, maka kaidah-kaidah telah ada waktu seseorang dilahirkan, dan semula manusia menerimanya secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal, mengetahui serta mematuhi kaidah-kaidah tersebut.

b) *Habituation*

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Memang pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaidah-kaidah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan. Akan tetapi, apabila hal itu setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhinya terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.

c) *Utility*

Pada dasarnya manusia mempunyai suatu kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang, belum tentu pantas dan teratur

bagi orang lain. Oleh karena itu di perlukan patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut, patokan-patokan merupakan pedoman-pedoman atau takaran tentang tingkah laku dinamakan kaidah. Manusia menyadari, bahwa kalau dia hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaidah-kaidah.

d) *Group identification.*

Salah satu penyebab orang patuh terhadap kaidah-kaidah adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karna ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok tadi. Bahkan kadang-kadang seseorang mematuhi kaidah-kaidah kelompok lain, karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.

2) Teori-teori Tentang Kepatuhan Hukum

Masalah kepatuhan hukum dibedakan dalam tiga proses, *Compliance* diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah

hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya maka kepatuhan akan ada, apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

Identification terjadi apabila kepatuhan terhadap hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang di beri wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan interaksi tadi. Walaupun seseorang tidak menyukai penegak hukum akan tetapi proses identifikasi terhadapnya berjalan terus dan mulai berkembang perasaan-perasaan positif terhadapnya, hal ini disebabkan, oleh karena orang yang bersangkutan berusaha untuk mengatasi perasaan-perasaan khawatirnya terhadap kekecewaan tertentu, dengan jalan menguasai obyek frustrasi tersebut dan mengadakan identifikasi.

Internalization seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum oleh karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya sejak semula pengaruh terjadi, atau oleh karena dia mengubah nilai-nilai yang semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konsensus yang di dasarkan pada motivasi secara

instrinsik. Pusat kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah bersangkutan, terlepas dari perasaan atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau memegang kekuasaan maupun pengawasannya.

Teori-teori tersebut diatas berorientasi pada psikologi, akan tetapi sangat penting dalam pembahasan tentang kepatuhan hukum, oleh karena adanya hubungan dengan erat antara sosiologi dengan psikologi, terutama dalam pembahasan perihal kepatuhan. Di dalam sosiologi hukum teori-teori tentang kepatuhan hukum pada umumnya dapat di golongan dalam teori paksaan, (*dwangtheorie*) dan teori konsensus (*consensustheorie*). Salah seorang tokoh dari teori paksa adalah Max Weber yang bertitik tolak pada asumsi, bahwa penguasa mempunyai monopoli terhadap sarana-sarana paksaan secara fisik, yang merupakan dasar bagi tujuan hukum untuk mencapai tata tertib atau ketertiban. Paksaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh kelompok orang-orang yang memang mempunyai wewenang untuk berbuat demikian.

Teori-teori selanjutnya berkisar pada penerapan sanksi-sanksi sebagai faktor yang menyebabkan kepatuhan hukum, yang oleh Barkun dianggap mempunyai kelemahan.

Sanksi pada hakikatnya merupakan reaksi terhadap pelanggaran kaidah-kaidah kelompok. Sanksi tersebut dapat

berwujud sebagai sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi-sanksi positif adalah unsur-unsur yang mendorong terjadinya kepatuhan atau perilaku yang sesuai dengan kaidah-kaidah. Sebaliknya sanksi-sanksi negatif menjatuhkan hukuman kepada pelanggar-pelanggar kaidah kelompok. Dengan demikian maka proses pemberian sanksi-sanksi mencakup suatu sistem imbalan dan hukuman, yang akibatnya adalah suatu dukungan yang efektif untuk mematuhi kaidah-kaidah.

Teori-teori paksaan mempunyai kelemahan-kelemahan, oleh karena kemungkinan besar paksaan tersebut tidak lagi berfungsi sebagai alat semata-mata, akan tetapi kemudian menjadi tujuan. Kepatuhan yang menjadi tujuan tenggelam oleh alat untuk mencapai tujuan tersebut. Kepatuhan yang semata-mata didasarkan pada sanksi-sanksi atau ancaman-ancaman belaka, akan menimbulkan motivasi untuk melanggar peraturan apabila tidak ada mekanisme yang melembaga untuk mengawasinya. Oleh karena sanksi-sanksi dan ancaman-ancaman tadi biasanya terumus dalam peraturan-peraturan pidana.

Kritik terhadap teori-teori paksaan ditemukan dalam ajaran-ajaran Eugen Ehrlich yang menganggap bahwa titik berat perkembangan hukum bukanlah terletak pada kekuasaan legislatif, yudikatif ataupun ilmu hukum, akan tetapi justru terletak dalam masyarakat sendiri. Fakta hukum yang bersifat

sosial yang menjadi dasar hukum adalah kebiasaan, kewenangan, milik dan kebebasan megutarakan keinginan-keinginan. Keempat fakta tersebut memberikan dukungan terhadap penerapan hukum ataupun bahkan dapat meniadakan sahnya hukum.

Menurut Schuyt terdapat bermacam-macam derajat penyebab mengapa warga masyarakat pada hukum yakni;

- a) Oleh karena kaidah-kaidah tersebut dianggap sebagai patokan yang benar.
- b) Oleh karena kaidah tersebut dianggap adil
- c) Oleh karena memang demikian kebiasaannya
- d) Oleh karena orang lain menganggapnya demikian
- e) Oleh karena pembentuk undang-undang dianggap mempunyai alasan yang benar
- f) Oleh karena undang-undang mempunyai tujuan-tujuan tertentu
- g) Oleh karena perundang-undangan diperlukan melalui prosedur yang benar-benar demokratis
- h) Oleh karena masyarakat bersikap acuh tak acuh.

Dengan demikian, maka teori-teori konsensus sebenarnya bertitik tolak pada asumsi bahwa suatu sistem hukum tidak akan bertahan lama, apabila tak ada dasar legalitasnya. Artinya, apabila warga masyarakat menerima sistem hukum tersebut, maka sistem tadi akan menghasilkan tata tertib dalam pergaulan hidup.

Kiranya telah jelas, betapa eratnya hubungan antara kepatuhan hukum dengan masalah kesadaran hukum.¹⁰⁷

Kesadaran hukum, kepatuhan hukum, dan hukum adat perlu disatu padankan sehingga, dengan demikian ketiganya berjalan beriringan di dalam kedudukan dan peranannya di dalam pembangunan. Hal ini disebabkan, karena asumsi bahwa hukum hanya akan efektif apabila mempunyai basis sosial yang relatif kuat unsur nilai hukum adat tersebut harus menjadi pijakan masyarakat secara sukarela.¹⁰⁸

C. Pengertian PKL yang Melakukan Jual beli

1. Pengertian PKL

Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.¹⁰⁹

Istilah PKL sebutan penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangunya ada lima. Lima kaki yang dimaksud adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” gerobak (yang sebenarnya adalah

¹⁰⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat INDONESIA*, Cet.12 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2012) h.310-337.

¹⁰⁸ Suriyaman Mustari, *Hukum Adat*, h. 151-154.

¹⁰⁹ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor : 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum , h. 9.

tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya.¹¹⁰

Menurut McGee dan Yeung (1977:hal 25) PKL mempunyai pengertian yang sama dengan "hawkers", yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual di tempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar. Menurut Waworoentoe, PKL banyak dijumpai pada ruang-ruang fungsional kota. Secara sosiologis, PKL merupakan entitas sosial yang di dalamnya terdapat pengelompokan menurut karakteristik tertentu seperti suku, etnik, bahasa, adat istiadat, asal daerah, jenis kegiatan, dan juga agama. Entitas ini memiliki aktivitas yang sama yakni berdagang pada tempat-tempat yang tidak semestinya dalam tata letak kota untuk melakukan aktivitas sosial dan ekonomi. Alisyahbana dalam sebuah penelitiannya menyebutkan bahwa pilihan menjadi PKL biasanya dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Pertama, keterpaksaan, karena tiada pekerjaan lain.¹¹¹

Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan

¹¹⁰Rafif Ramadhan, "Perubahan Sosial – Ekonomi Pkl (Pedagang Kaki Lima) Dalam Program Sentralisasi Sektor Informal Perkotaan Di Dtc Wonokromo1" (On-line), tersedia di <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmntse83b2df794full.pdf> anal 5-6.htm (21 Oktober 2019) dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah.

¹¹¹Muhammad Yunus1, Auliya Insani "Tata Kelola Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar (Studi Kasus Pedagang Pisang Epe' Di Pantai Losari)". *Jurnal Analisis dan Kebijakan Publik*, Vol. 3 No. (Juni 2017),h. 23.

memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.¹¹²

2. Ciri-ciri PKL

Ciri-ciri pedagang kaki lima menurut Aris Ananta yaitu: kegiatan usaha tidak terorganisasi secara baik, tidak memiliki surat izin usaha, tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja, bergerombol di trotoar atau di tepi jalan protokol, di pusat-pusat keramaian, menjajakan barang dagangannya sambil teriak-teriak, kadang berlari sambil mendekati konsumennya.

Ciri- ciri Menurut Agustinawati Umumnya tergolong angkatan kerja produktif, banyak pedagang yang berusia produktif tetapi tidak mendapat pekerjaan di sektor formal sehingga banyak yang berusaha

¹¹²Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, h.2.

di sektor informal, Umumnya sebagai mata pencaharian pokok. Seorang pedagang kaki lima tidak mempunyai pekerjaan lain selain sebagai pedagang kaki lima sehingga pekerjaan itu menjadi pekerjaan utama untuk keluarganya, Tingkat pendidikan relatif rendah. Banyak pedagang kaki lima yang tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi, mereka hanya mengandalkan pengalaman yang mereka punya selama menekuni sebagai pedagang, Pekerjaan sebelumnya umumnya sebagai petani atau buruh, karena hasil yang didapatkan sebagai petani dan buruh tidak dapat mencukupi kebutuhannya maka banyak dari mereka yang kemudian beralih menjadi pedagang kaki lima, Permodalannya lemah dan omzet penjualannya kecil. Pedagang kaki lima tidak mau mengambil kredit dari lembaga perbankan menyebabkan mereka kekurangan modal dan kesulitan untuk mengembangkan usahanya sehingga menyebabkan omzet mereka pun menjadi kecil, Barang dagangannya umumnya adalah bahan pangan, sandang, dan kebutuhan sekunder. Banyak pedagang yang menjual makanan, minuman, dan banyak pula pedagang yang meniru pedagang lain yang berhasil dengan barang dagangannya, Tingkat pendapatannya relatif rendah untuk memenuhi kebutuhan keluarga di perkotaan.

Sementara itu menurut Winardi, ciri-ciri pkL adalah pedagang memproduksi barang-barang atau menyelenggarakan jasa-jasa yang sekaligus dijual kepada konsumen, Mereka umumnya menjajakan

barang-barang dagangan dengan gelaran tikar di pinggir-pinggir jalan atau toko-toko yang dianggap strategis, menggunakan meja, kereta dorong, maupun kios kecil, Umumnya menjajakan bahan-bahan makanan, minuman, barang-barang konsumsi lainnya, termasuk didalamnya barang-barang konsumsi tahan lama secara eceran, Umumnya bermodal kecil, bahkan tidak jarang mereka hanya merupakan alat bagi pemilik modal, dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atas jerih payahnya, Pada umumnya kelompok pedagang kecil merupakan kelompok marginal, bahkan ada pula yang tergolong pada kelompok sub marginal, Umumnya kualitas barang yang diperdagangkan relatif rendah, Volume omzet para pedagang kecil relatif tidak seberapa besar karena juga dipengaruhi jumlah modal yang kecil pula, Para pembeli umumnya mempunyai tingkat daya beli yang rendah, Kasus pedagang kecil berhasil secara ekonomis, sehingga akhirnya memiliki tangga dalam jenjang hirarki pedagang yang sukses agak langka, Pada umumnya usaha pedagang kecil merupakan usaha family enterprises, yaitu ibu, anak-anak turut membantu dalam usaha tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, Barang-barang yang diperdagangkan pedagang kecil biasanya tidak berstandar dan penggantian barang-barang yang diperdagangkan sering terjadi.¹¹³

Pedagang Kaki Lima menurut Rahma Madjid

¹¹³ Agustinawati, "Pengertian Pedagang Kaki Lima Ciri-Ciri Pedagang Kaki Lima" (On-

- a. Pedagang Kaki Lima pada umumnya mempunyai modal kecil dan tidak mempunyai usaha menetap, berdagang di emperan/depan toko, di pinggiran jalan, trotoar, di atas got, di taman, bantaran kali dan di areal parkir dan tempat-tempat orang ramai.
- b. Jam berdagang tidak tentu, ada pagi, ada siang, sore dan malam hari bahkan ada yang dari pagi hingga sore.
- c. Jenis dagangan beraneka ragam, ada jajanan (makanan proses), tanaman hias/ikan hias, pakaian jadi, sepatu, tas, kerajinan, buah-buahan dan lain-lain.
- d. Tempatnya dalam bentuk bangunan ada yang tertutup, terbuka, menggunakan payung, gelaran, gerobak, pikulan, meja dan sebagainya, konstruksi bangunan darurat, semi permanen dan tanpa bangunan.
- e. Pada umumnya pedagang kaki lima menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, lalu lintas, ketertiban dan kebersihan.¹¹⁴

3. Dasar Hukum PKL

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor : 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Pasal 30.

line), tersedia di: <https://text-id.123dok.com/document/ozlnkmdgq-pengertian-pedagang-kaki-lima-ciri-ciri-pedagang-kaki-lima.html>

¹¹⁴Rachmawati Madjid, "Dampak Kegiatan Pedagang Kaki Lima terhadap Lingkungan di DKI Jakarta". *Jurnal Ekonomi*, Vol. 1 No.3 (Mei-Agustus 2013), h. 64.

- a. Walikota menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat kepentingan umum tertentu lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.
- b. Setiap orang atau badan dilarang berdagang, di atas badan jalan/trotoar, halte, halaman serta tempat parkir toko dan atau rumah toko, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Setiap orang di larang membeli barang dagangan pedagang kaki Lima yang berjualan pada tempat sebagaimana pada ayat (2).

D. Tinjauan Pustaka

Skripsi yang di susun oleh Isnaini Nur Hasanah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap penerapan Perda No.26 tahun 2002 tentang larangan berjualan di trotoar studi kasus di trotoar Malioboro dan Trotoar Stasiun Lempuyang Yogyakarta, trotoar yang seharusnya untuk berjalan kaki namun sekarang beralih fungsi menjadi tempat berjualan. Berjamurnya PKL di trotoar stasiun Lempuyangan menimbulkan masalah baru di dalam masyarakat dan dinas pemerintahan. Seiring dengan timbulnya masalah ini maka lahir Peraturan daerah No.26 tahun 2002 tentang penataan pedagang kaki lima yang didalamnya membahas penggunaan dan fungsi trotoar. Hasil penelitian dari lahirnya Perda No.26 tahun 2002 ini sebuah hasil yang baik untuk memanfaatkan trotoar, namun Perda ini belum cukup kuat untuk menjadi landasan karena Perda ini hanya sebatas melarang dan menata para pedagang

kaki lima. Sedangkan dalam hukum Islam melarang keras mengambil hak orang lain dan mengurangi pemanfaatan fasilitas umum untuk keperluan pribadi. Islam mengatur secara detail urusan yang bersifat moral maupun materi. Terlebih lagi pedagang, pembeli dan pengguna jalan tetap bisa mendapatkan haknya masing-masing itu lebih baik. Dalam Al-qur'an sudah jelas bahwa dilarang keras untuk mencari harta dengan cara *batil* terdapat dalam QS: Al-Baqarah 188.¹¹⁵

Skripsi yang disusun oleh Dwi Amita Budiarti mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Pedagang Kaki Lima Berjualan Di Fasilitas Umum Studi Pada Pedagang Kaki Lima di Jl. Jati Baru Kel. Kampung Bali Kec.Tanah Abang Jakarta Pusat. Bekerja salah satu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sebaiknya dalam bekerja tetap mentaati peraturan yang berlaku, demi menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Namun yang terjadi pedagang kaki lima yang berada di jalan Jati Baru menggunakan fasilitas umum untuk berjualan sehingga menimbulkan kemacetan dan ketidakteraturan serta mengganggu orang lain disekitarnya, padahal Pemerintah DKI Jakarta membuat aturan mengenai larangan penggunaan fasilitas umum sebagai tempat berdagang. Peraturan yang telah ditetapkan untuk dapat berjualan di trotoar dari pukul 08.00 WIB hingga 17.00 WIB. Sarana yang digunakan untuk berjualan seperti gerobak, pikulan, meja dan kursi, tiker dan gantungan baju. Pemerintah telah mengeluarkan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum

¹¹⁵ Isnaini Nur Hasanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap penerapan Perda No.26 tahun 2002 tentang larangan berjualan di trotoar study kasus di trotoar Malioboro dan Trotoar Stasiun Lempuyang Yogyakarta". (Skripsi Program Ilmu Hukum Islam, Yogyakarta, 2014), h. ii.

mengenai larangan penggunaan fasilitas umum untuk berjalan, akan tetapi masih banyak pedagang kaki lima yang melakukan perlawanan terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga pemerintah melakukan tindakan penertiban. Ditinjau dari hukum Islam, praktik yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dalam menggunakan fasilitas umum untuk berjalan tidak boleh dilakukan, karena menimbulkan kemudharatan dan dampak yang kurang baik bagi banyak orang. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah mengenai larangan penggunaan fasilitas umum untuk berjalan sudah menciptakan kemaslahatan untuk banyak orang demi menciptakan ketertiban, kenyamanan serta keindahan kota, tetapi disalahgunakan oleh pedagang kaki lima untuk berjalan. Sehingga pemerintah membuat kebijakan sementara yang memberi kemaslahatan bagi pedagang kaki lima, tetapi tidak memberikan kemaslahatan bagi pengguna jalan.¹¹⁶

Skripsi yang disusun oleh Ahmad Samngani mahasiswa IAIN Purwokerto yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Yang Dilarang Berjualan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Studi Kasus di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto). Praktik jual beli PKL yang dilakukan di tempat yang dilarang berjualan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas seringkali menimbulkan masalah, salah satunya di kawasan Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 tentang “Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima” yang ditetapkan pada

¹¹⁶Dwi Amita Budiarti, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Pedagang Kaki Lima Berjualan Di Fasilitas Umum Studi Pada Pedagang Kaki Lima di Jl. Jati Baru Kel. Kampung Bali Kec.Tanah Abang Jakarta Pusat" (Skripsi Program Hukum Ekonomi Islam, Lampung, 2018), h. 3.

tanggal 22 Maret tahun 2011, di dalamnya memuat ketentuan dan pengaturan berdagang bagi PKL di kawasan Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto. Berdasarkan peraturan tersebut menetapkan bahwa Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto termasuk kawasan yang dilarang untuk berjualan. Namun masih banyak para PKL yang menempati. PKL tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas.. Skripsi ini memfokuskan penelitian pada bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli yang dilakukan oleh PKL dengan memanfaatkan fasilitas milik publik. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode pengumpulan data yang digunakan yakni metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis dan normatif yaitu dengan menggunakan kaidah-kaidah fikih dan hukum positif terkait dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli yang dilakukan PKL di kawasan Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto adalah sah secara rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam. Namun dalam praktiknya, PKL yang beraktivitas di lokasi yang dilarang oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas masih melakukan tindakan yang dapat membawa madarat bagi pengguna jalan trotoar serta menolak kemaslahatan umum yang seharusnya tercapai dari peraturan yang dibentuk. Fenomena ini juga tidak sesuai dengan kaidah fikih serta melanggar aturan hukum yang berlaku. Selain itu praktik PKL tersebut tidak berlandaskan asas dan prinsip dalam bermuamalat yaitu asas mendahulukan kewajiban daripada hak, asas perlindungan hak, asas menjunjung nilai-nilai keadilan, menghindari unsur

penganiayaan dan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Oleh karenanya, praktik PKL di kawasan yang dilarang berjualan di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto tergolong jual beli yang sah dan diperbolehkan namun, ketika ada PKL tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas maka bentuknya menjadi jual beli dalam kategori yang dilarang.¹¹⁷



¹¹⁷ Ahmad Samngani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Yang Dilarang Berjualan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Studi Kasus di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto." (Skripsi Program Hukum Ekonomi Syariah, Purwakerto, 2018), h. vii.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Utama

Departemen Negara RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, Jakarta: Lautan Lestari, 2007.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor : 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum

A. Buku

Al-Tarmizi, Sunan Al-Tirmidzi, Juz 3, Maktabah Kutub Al-Mutun (Al - Mutun).

Amir Syarifudin, *Usul Fiqih*, Jilid 1, Cet.1, Jakarta: Logos, Wacaan Ilmu, 1997.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Cet.4, Jakarta: Rajawali, 2013.

Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Bandung: Rekayasa Sains Bandung, 2007.

Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Buchari Alma, *Dasar-dasar etika bisnis Islam*, Cet.3, Bandung: Alfabeta, 2003.

Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2011.

Dwi Amita Budiarti, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Pedagang Kaki Lima Berjualan Di Fasilitas Umum Studi Pada Pedagang Kaki Lima di Jl. Jati Baru Kel. Kampung Bali Kec.Tanah Abang Jakarta Pusat", Skripsi Program Hukum Ekonomi Islam, Lampung, 2018.

Faisal Badroen, et. al. *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.

Fathurohman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 10, Jakarta: Rajawali, 2016.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, Jilid III, terj. Mad'Ali, Bandung: Triganda Karya, 1997.

Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Cet.1, Jakarta: Raja Grafindo.

Indah Purwanti, "Studi Kasus Tentang Pemahaman Orang Tua Yang Memiliki Anak"

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 249-250

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Cet. 2, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.

Isnaini Nur Hasanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap penerapan Perda No.26 tahun 2002 tentang larangan berjualan di trotoar study kasus di trotoar Malioboro dan Trotoar Stasiun Lempuyang Yogyakarta". Skripsi Program Ilmu Hukum Islam, Yogyakarta, 2014.

Khotibul Umum, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2016.

Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 4, Permatanet Publishing, 2016.

Mardani, *Fiqh Ekonom Syariah*, Cet. 3, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta:Kanisius, 2007.

Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muuhtoj*, Juz, h. 2.

Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor : 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum .

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Rahmat syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat INDONESIA*, Cet.12, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2012.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012),

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.

Susiadi, *Metode Penelitian* Lampung; Pusat penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Study Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, Cet. 2 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010).

Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business*,

B. Sumber Lain

Efa Rodhiah Nur, Riba dan Gharat, dalam *Jurnal Al-Adalah Hukum Islam*, Vol.XII, No.3, Juni 2015.

Muhammad Yunus¹, Auliya Insani "Tata Kelola Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar (Studi Kasus Pedagang Pisang Epe' Di Pantai Losari)". *Jurnal Analisis dan Kebijakan Publik*, Vol. 3 No. (Juni 2017),h. 23.

Rachmawati Madjid, "Dampak Kegiatan Pedagang Kaki Lima terhadap Lingkungan di DKI Jakarta". *Jurnal Ekonomi*, Vol. 1 No.3 Mei-Agustus 2013.

Agustinawati, "Pengertian Pedagang Kaki Lima Ciri-Ciri Pedagang Kaki Lima" (On-line), tersedia di: <https://text-id.123dok.com/document/ozlnkmdgq-pengertian-pedagang-kaki-lima-ciri-ciri-pedagang-kaki-lima.html>

Ahmad Samngani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Yang Dilarang Berjualan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Studi Kasus di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto." (Skripsi Program Hukum Ekonomi Syariah, Purwakerto, 2018),

Berkebutuhan Khusus Di Sdn Kembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik". (Skripsi Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2012), h.6.
[Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/2258/6/08410049_Bab_2.Pdf](http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/2258/6/08410049_Bab_2.Pdf) (27 Oktober 2019)

<http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-pasar-dan-jenis-jenis-pasar.html>. diakses pada Tanggal 15 Februari 2018.

Kamus On-line tersedia di: **<https://Kbbi.Web.Id/Paham>** (27 Oktober 2019)
Rafif Ramadhan, "Perubahan Sosial – Ekonomi Pkl (Pedagang Kaki Lima) Dalam Program Sentralisasi Sektor Informal Perkotaan Di Dtc Wonokromo1" (On-line), tersedia di <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmntse83b2df794full.pdf> anal 5-6.htm (21 Oktober 2019) dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah.

